

PERBANDINGAN BELANJA PEGAWAI, BELANJA HIBAH, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID 19 SUMATERA SELATAN

Irza Meliana¹, Nelly Masnila², Anggeraini Oktarida³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

Email: Nellymasnila@polsri.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, dan Belanja Tidak Terduga Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19 Sumatera Selatan. Penelitian ini dikhususkan hanya pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Data penelitian menggunakan data sekunder. Data penelitian diperoleh dari laporan realisasi anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang diperoleh dari website resmi BPK RI (www.bpk.go.id). Jumlah sampel sebanyak 17 Kabupaten/Kota mulai dari tahun 2018-2021 (4 tahun) dengan total pengamatan 68 laporan realisasi anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Teknik analisis data menggunakan Uji Beda Paired Sample t-Test dengan bantuan software SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap Belanja Pegawai dan Belanja Tidak Terduga sebelum dan saat Pandemi Covid 19, sedangkan pada Belanja Hibah tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan saat Pandemi Covid 19 pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci: *Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Tidak Terduga*

Abstract

This study aims to determine the Comparison of Employee Expenditure, Grant Expenditures, and Unexpected Expenditures Before and During the Covid 19 Pandemic in South Sumatra. This research is devoted only to districts/cities in the province of South Sumatra. The research data uses secondary data. The research data was obtained from reports on the realization of district/city budgets in South Sumatra Province which were obtained from the official website of the BPK RI (www.bpk.go.id). The total sample is 17 Regencies/Cities starting from 2018-2021 (4 years) with a total of 68 observations of district/city budget realization reports in South Sumatra Province. The data analysis technique used the Paired Sample t-Test with the help of SPSS software version 27. The results showed that there were significant differences in Employee Expenditures and Unexpected Expenditures before and during the Covid 19 Pandemic, whereas in Grants Expenditures there were no significant differences before and during the Covid 19 Pandemic in the Regency/City of South Sumatra Province.

Keywords: *Employee Expenditure, Grant Expenditures, Unexpected Expenditure.*

1. PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* suatu wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua. Permasalahan dampak pandemi *Covid 19* yang meluas dari berbagai aspek kehidupan, Pemerintah menerbitkan berbagai regulasi terkait penanganan pandemi *Covid 19*. Berdasarkan Instruksi tersebut, Pemerintah

Republik Indonesia bekerja secara padu dan terencana dalam menghadapi Pandemi *Covid 19*, hingga pada tanggal 31 Maret 2020 diterbitkannya penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan yang kemudian

ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan keuangan dalam rangka penanganan Pandemi *Covid 19*.

Oleh karena itu, perlu adanya penataan organisasi perangkat daerah. Salah satu bentuk penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam dampak dari Pandemi *Covid 19* yang menyebabkan krisis di berbagai tempat di belahan dunia mau tidak mau juga turut mempengaruhi situasi secara global, nasional dan lokal yang kemudian ikut memperkeruh situasi ekonomi saat ini. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah di negara-negara seluruh dunia memperbaiki dan mengantisipasi melalui berbagai kegiatan guna meningkatkan kinerja dalam hal penanganan pandemi. Banyaknya korban yang berjatuh dengan kecepatan yang cukup mengawatirkan menyebabkan penanganan yang dilakukan melalui lintas bidang sektor dan kegiatan.

Realisasi belanja sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) masih tergolong rendah. Hingga September 2021, realisasi belanja sejumlah pemerintah daerah bahkan masih ada yang dibawah 50 persen. Berdasarkan data Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel, ada delapan daerah yang realisasi belanjanya masih dibawah 50 persen. Diantaranya, Kota Palembang 49,19 persen dan Lubuk Linggau 41,38 persen. Kemudian, Kabupaten Empat Lawang 46,15 persen, PALI 45,60 persen, Banyuasin 45,56 persen, Lahat 43,94 persen, Ogan Ilir 43,54 persen dan yang paling rendah Musi Rawas Utara (Muratara) 37,74 persen. Sementara serapan belanja tertinggi dilakukan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dengan capaian 78,69 persen. Disusul OKU Selatan 60,61 persen, OKU Timur 55,88 persen, Musi Rawas 53,55 persen. Kota Pagara Alam 52,11 persen, Kabupaten OKU 51,05 persen, Muara Enim 51 persen, OKI 50,92 persen dan Provinsi Sumsel 50,23 persen.

Di lansir dari (sumsel.inews.id, 2021), menyampaikan bahwa “Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menyorot anggaran belanja pegawai di Sumatera Selatan yang lebih besar dibanding belanja modal pada tahun anggaran 2021. Untuk belanja pegawai cenderung meningkat dari semula 19,33 persen atau senilai Rp 2,06 triliun menjadi 20,09

persen atau senilai Rp 2,15 triliun”. Berikut perbandingan realisasi Belanja Pegawai Sumatera Selatan dari tahun 2018-2021.

Tabel 1. Data Realisasi Belanja Pegawai

Tahun	Realisasi
2018	1.657.583.970.192,00
2019	1.757.169.664.436,00
2020	1.771.524.397.218,00
2021	1.923.290.549.742,00

Sumber : www.bpk.go.id (Data diolah, 2023)

Melalui tabel 1, dapat dilihat bahwa dari tahun 2018-2019 realisasi Belanja Pegawai meningkat dengan stabil, namun pada tahun 2020-2021 Belanja Pegawai meningkat dengan pesat sebesar 152 M. Belanja Pegawai salah satunya dipergunakan untuk Belanja Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap. Di masa Pandemi *Covid 19*, dokter dan tenaga kesehatan menjadi garda depan masyarakat. Dilansir dari (id.theasianparent.com) bahwa “Risiko mereka terpapar penyakit dari pasien yang ditanganinya juga tinggi. Dokter pun harus selalu siap sedia kapanpun dibutuhkan. Besaran gaji Dokter di masa pandemi *Covid 19* hingga dapat Insentif dengan jumlah menggiurkan dan fantastik. Di tengah pandemi *Covid 19* ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif untuk tenaga medis salah satunya Dokter. Selain itu, di masa pandemi *Covid 19* Dokter juga akan mendapatkan santunan kematian dari pemerintah”. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Yan Megawandi, Mulyaningsih, 2021 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masa Pandemi *Covid 19*.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berupaya dalam meningkatkan realisasi belanja hibahnya dengan tujuan untuk meningkatkan belanja pembangunan infrastruktur. Dilansir dari (sumsel.bpk.go.id, 2021) bahwa Sumatera Selatan (Sumsel) terpilih menerima dana bantuan hibah dari pemerintah Amerika Serikat untuk pembangunan infrastruktur serta pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Direktur Kerjasama Pendanaan Bilateral Kementerian PPN/Bappenas, Kurniawan Ariadi, mengatakan Sumsel menjadi satu di antara lima provinsi di Indonesia yang mendapatkan bantuan luar negeri program Millennium Challenge Compact (MCC) dari Amerika Serikat.

“Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali dan Riau yang menerima”. Berikut perbandingan realisasi Belanja Hibah Sumatera Selatan dari tahun 2018-2021. Melalui tabel 1, dapat dilihat bahwa dari tahun 2018-2019 realisasi Belanja Pegawai meningkat dengan stabil, namun pada tahun 2020-2021 Belanja Pegawai meningkat dengan pesat sebesar 152 M. Belanja Pegawai salah satunya dipergunakan untuk Belanja Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap. Di masa Pandemi Covid 19, dokter dan tenaga kesehatan menjadi garda depan masyarakat. Dilansir dari (id.theasianparent.com) bahwa “Risiko mereka terpapar penyakit dari pasien yang ditanganinya juga tinggi. Dokter pun harus selalu siap sedia kapanpun dibutuhkan. Besaran gaji Dokter di masa pandemi Covid 19 hingga dapat Insentif dengan jumlah menggiurkan dan fantastik. Di tengah pandemi Covid 19 ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif untuk tenaga medis salah satunya Dokter. Selain itu, di masa pandemi Covid 19 Dokter juga akan mendapatkan santunan kematian dari pemerintah”. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Yan Melgawandi, Mulyaningsih, 2021 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masa Pandemi Covid 19.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berupaya dalam meningkatkan realisasi belanja hibahnya dengan tujuan untuk meningkatkan belanja pembangunan infrastruktur. Dilansir dari (sumsell.bpk.go.id, 2021) bahwa Sumatera Selatan (Sumsell) terpilih menerima dana bantuan hibah dari pemerintah Amerika Serikat untuk pembangunan infrastruktur serta pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Direktur Keljasama Pendanaan Bilateral Kementerian PPN/Bappenas, Kurniawan Ariadi, mengatakan Sumsell menjadi satu di antara lima provinsi di Indonesia yang mendapatkan bantuan luar negeri program Millennium Challenge Compact (MCC) dari Amerika Serikat. “Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali dan Riau yang menerima”. Berikut perbandingan realisasi Belanja Hibah Sumatera Selatan dari tahun 2018-2021.

Tabel 2. Data Realisasi Belanja Hibah

Tahun	Realisasi
2018	2.193.698.605.052,00
2019	1.650.182.953.794,72
2020	1.873.445.636.520,56
2021	1.629.473.647.674,00

Sumber : www.bpk.go.id (Data diolah, 2023)

Melalui tabel 2, dapat dilihat bahwa dari tahun 2018-2019 terjadinya penurunan realisasi Belanja Hibah yang cukup besar dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang disebabkan oleh Pandemi Covid 19. Belanja Hibah merupakan pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Salah satu komponen yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan APBD baik ditingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten adalah Belanja Tidak Terduga. Dilansir dari (Gatra.com, 2022), “Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Hudori mengatakan guna mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat pandemic Covid 19 atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi, pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota agar menambahkan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Akhir (TA) 2022 sebesar 5%-10% dari APBD Tahun Akhir (TA) 2021”. Berikut perbandingan realisasi Belanja Tidak Terduga Sumatera Selatan dari tahun 2018-2021.

Tabel 3. Data Realisasi Belanja Tidak Terduga

Tahun	Realisasi
2018	134.480.200,00
2019	4.071.125.143,00
2020	197.104.066.604,97
2021	14.055.098.162,00

Sumber : www.bpk.go.id (Data diolah, 2023)

Melalui tabel 3, dapat dilihat bahwa dari tahun 2018-2019 realisasi Belanja Tidak Terduga terus meningkat dengan stabil, namun pada tahun 2020 realisasi Belanja Tidak Terduga melonjak sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa Pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi serapan anggaran Belanja Tidak Terduga di Provinsi Sumatera Selatan. Agar anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) terealisasi dengan optimal, mengingat kondisi ekonomi sekarang kembali menurun perlu segera melakukan percepatan serapan belanja daerah, sehingga dapat memulihkan perekonomian masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Azhar Thahir, 2020 menunjukkan analisis rasio keserasian BTT pemerintah daerah Kabupaten Mamuju berada pada keadaan fluktuatif yang disebabkan pemerintahan terus berubah-ubah terlebih pada saat ini sedang berlangsung pandemi *Covid 19*.

Kepala Kanwil DJPb Sumsel, mengatakan “secara total bahwa realisasi pendapatan APBD Pemda di Sumsel masih lebih tinggi ketimbang realisasi belanja. Dimana untuk total pendapatan mencapai Rp25,3 triliun. Sementara itu untuk total realisasi belanja hanya mencapai Rp21,59 triliun. Bisa dikatakan masih banyak dana yang mengendap di kas daerah yang belum tersalurkan” (mediaindonesia.com, 2022). Kondisi tersebut harus mendapat perhatian dari pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing, agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terealisasi dengan optimal, mengingat kondisi ekonomi sekarang kembali menurun perlu segera melakukan percepatan serapan belanja daerah, sehingga dapat memulihkan perekonomian masyarakat.

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Klasifikasi kode belanja daerah terbagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dalam penelitian ini belanja langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai sedangkan belanja tidak langsung yang terdiri dari Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga.

2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Belanja Pegawai

"Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan" (Erlina et al., 2020).

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjelaskan bahwa "Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah".

Menurut Anisa Abdu (2021) Belanja pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Belanja Tidak Terduga

"Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya" (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (4) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Selanjutnya, menurut (Kementerian Keuangan, 2022) Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan diharapkan tidak berulang seperti bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah". Dari kerangka tersebut dapat ditulis beberapa hipotesis sebagai berikut :

H1 : Terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

H2 : Terdapat perbedaan antara Belanja Hibah sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

H3 : Terdapat perbedaan antara Belanja Tidak Terduga sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena penelitian ini akan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk mengumpulkan data mengenai Belanja Pegawai, Belanja Hibah, dan Belanja Tidak Terduga. Untuk mendapatkan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam periode sebelum Pandemi *Covid 19* pada tahun 2018-2019 dan periode saat Pandemi *Covid 19* pada tahun 2020-2021.

Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Hibah, dan Belanja Tidak Terduga 17 Provinsi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dalam jangka waktu 4 tahun dari tahun 2018-2021. Menurut Sugiyono (2017)

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi". Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode teknik sampling yaitu Non probability sampling dengan menggunakan sampling jenuh. Teknik *Non Probability Sampling* yang dipilih yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Jumlah pengamatan pada penelitian ini adalah 68 sampel (17 Kabupaten/Kota x 4 tahun).

Teknik Analisis

Teknik analisis data yang dipakai untuk mengetahui Perbandingan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, dan Belanja Tidak Terduga Sebelum dan Saat Pandemi *Covid 19* ialah menggunakan Uji Paired Sample t-test. Untuk

melakukan analisis data dalam penelitian ini maka digunakan aplikasi untuk mempermudah pengolahan data yaitu aplikasi *Statistical Program For Spesial Science (SPSS)* versi 27.00 for windows.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 4. Hasil Uji Paired Sample t-Test Belanja Pegawai

		Paired Samples Test							
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval of the Difference				
Pair		Mean	n	Mean	Lower	Upper			
1	BP_SebelumCovid - BP_SaatCovid	-.0703	7	.03354	-.13861	-.00212	2.098	33	.044

Sumber: Data Diolah, 2023

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa selisih perbedaan dari Belanja Pegawai sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* adalah antara -1,13861 sampai dengan 0,0212. Lalu diketahui, bahwa nilai signifikansi pada uji tersebut yaitu sebesar 0,044 (p value < 0,05) maka H0 ditolak atau kedua nilai populasi adalah tidak identik (nilai Belanja Pegawai sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* berbeda secara nyata). Maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pertama terjawab dan hipotesis pertama diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan atas Belanja Pegawai sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 5. Hasil Uji Paired Sample t-Test Belanja Hibah

		Paired Samples Test							
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval of the Difference				
Pair		Mean	n	Mean	Lower	Upper			
1	BH_SebelumCovid - BH_SaatCovid	.0582	4	1.15602	-.34512	.46159	.294	33	.771

Sumber: Data Diolah, 2023

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa selisih perbedaan dari Belanja Hibah sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* adalah antara -0,34512 sampai dengan 0,46159. Lalu diketahui, bahwa nilai signifikansi pada uji tersebut yaitu sebesar 0,771 (p value > 0,05) maka H0 diterima atau kedua nilai populasi adalah identik (nilai

Belanja Hibah sebelum dan saat Pandemi Covid 19 tidak berbeda secara nyata). Maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah kedua terjawab dan hipotesis kedua ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan atas Belanja Hibah sebelum dan saat Pandemi Covid 19 pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 6. Hasil Uji Paired Sample t-Test Belanja Tidak Terduga

		Paired Samples Test					
		Paired Differences		95% Confidence Interval of the Difference		t	Sig. (2-tailed)
Pair	Mean	Std. Deviation	Mean	Lower	Upper		
1	B.J.T. Sebelum Covid - B.J.T. SaatCovid	2.912	.54017	-4.03016	-1.79530	5.392	.000
	n	73					

Sumber: Data Diolah, 2023

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa selisih perbedaan dari Belanja Tidak Terduga sebelum dan saat Pandemi Covid 19 adalah antara -4,03016 sampai dengan -1,79530. Lalu diketahui, bahwa nilai signifikansi pada uji tersebut yaitu sebesar 0,000 (p value $< 0,05$) maka H_0 ditolak atau kedua nilai populasi adalah tidak identik (nilai Belanja Tidak Terduga sebelum dan saat Pandemi Covid 19 berbeda secara nyata). Maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah ketiga terjawab dan hipotesis ketiga diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan atas Belanja Tidak Terduga sebelum dan saat Pandemi Covid 19 pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Pembahasan

Perbandingan Belanja Pegawai Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19 Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil pengujian menggunakan SPSS Versi 27 Uji beda Paired Sample t-Test dengan tingkat signifikansi Perbandingan Belanja Pegawai untuk sebelum dan saat Pandemi Covid 19 tingkat signifikansinya sebesar 0,044 (p value $< 0,05$) maka H_0 ditolak atau kedua nilai populasi adalah tidak identik (nilai Belanja Pegawai sebelum dan saat Pandemi Covid 19 berbeda secara nyata). Maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pertama terjawab dan hipotesis pertama diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan atas Belanja

Pegawai sebelum dan saat Pandemi Covid 19 pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjelaskan bahwa "Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah".

Dilansir dari (sumsel.inews.id, 2021), menyampaikan bahwa "Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyorot anggaran belanja pegawai di Sumatera Selatan yang lebih besar dibanding belanja modal pada tahun anggaran 2021. Untuk belanja pegawai cenderung meningkat dari semula 19,33 persen atau senilai Rp 2,06 triliun menjadi 20,09 persen atau senilai Rp 2,15 triliun".

Penelitian ini sejalan dengan Yan Megawandi, Mulyaningsih, 2021 pada penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masa Pandemi Covid 19 kondisinya sebagai berikut : untuk belanja pegawai pada belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar 6,66 persen, sedangkan belanja pegawai pada pos belanja langsung mengalami kenaikan sangat tinggi yaitu mencapai 200,73 persen. Hal tersebut terjadi karena adanya kenaikan pada belanja honor PNS sebesar 954,81 persen dan belanja pegawai non PNS sebesar 221,97 persen serta belanja pegawai BOS sebesar 19,31 persen. Meningkatnya belanja pegawai tersebut membuat persentase belanja pegawai terhadap belanja daerah secara total maka Tahun 2020 merupakan yang tertinggi dalam lima Tahun terakhir yaitu 35,38 persen. Hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat Perbedaan Belanja Pegawai sebelum dan saat Pandemi Covid 19.

Perbandingan Belanja Hibah Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19 Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil pengujian menggunakan SPSS Versi 27 Uji beda Paired Sample t-Test dengan tingkat signifikansi Perbandingan Belanja Hibah untuk sebelum dan saat Pandemi Covid

19 tingkat signifikansinya sebesar 0,771 (p value $> 0,05$) maka H_0 diterima atau kedua nilai populasi adalah identik (nilai Belanja Hibah sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* tidak berbeda secara nyata). Maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah kedua terjawab dan hipotesis kedua ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan atas Belanja Hibah sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Belanja Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Hasil penelitian ini didukung oleh (sumsel.bpk.go.id, 2021) bahwa Sumatera Selatan (Sumsel) terpilih menerima dana bantuan hibah dari pemerintah Amerika Serikat untuk pembangunan infrastruktur serta pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Direktur Kerjasama Pendanaan Bilateral Kementerian PPN/Bappenas, Kurniawan Ariadi, mengatakan Sumsel menjadi satu di antara lima provinsi di Indonesia yang mendapatkan bantuan luar negeri program Millennium Challenge Compact (MCC) dari Amerika Serikat. "Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali dan Riau yang menerima". Sehingga, hal ini menjadi alasan mengapa untuk belanja hibah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah tidak terdapat perbedaan yang signifikan dikarenakan belanja hibah ini ketika masa sebelum Pandemi *Covid 19* belanja hibah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah juga dinilai belum terlalu optimal dan ketika masa Pandemi *Covid 19* belanja hibah ini juga sama belum terlalu optimal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Perbandingan Belanja Tidak Terduga Sebelum dan Saat Pandemi *Covid 19* Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil pengujian menggunakan *SPSS* Versi 27 Uji beda *Paired Sample t-Test* dengan tingkat signifikansi Perbandingan Belanja Tidak Terduga untuk sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* tingkat signifikansinya sebesar 0,000 (p value $< 0,05$) maka H_0 ditolak atau kedua nilai populasi adalah tidak identik

(nilai Belanja Tidak Terduga sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* berbeda secara nyata). Maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah ketiga terjawab dan hipotesis ketiga diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan atas Belanja Tidak Terduga sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut (Kementerian Keuangan, 2022) Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan diharapkan tidak berulang seperti bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah".

Dilansir dari (Gatra.com, 2022), "Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Hudori mengatakan guna mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat pandemic *Covid 19* atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi, pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota agar menambahkan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Akhir (TA) 2022 sebesar 5%-10% dari APBD Tahun Akhir (TA) 2021".

Penelitian ini sejalan dengan Azhar Thahir, 2020 pada penelitiannya menunjukkan bahwa analisis rasio keserasian BTT pemerintah daerah Kabupaten Mamuju berada pada keadaan fluktuatif yang disebabkan pemerintahan terus berubah-ubah terlebih pada saat ini sedang berlangsung pandemi *Covid 19*. Rasio efisiensi belanja daerah pemerintah Kabupaten Mamuju dari tahun anggaran 2018 sebesar 95,87%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,44% menjadi 94,43%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali sebesar 1,88% hingga mencapai 96,31%. Sehingga, Rumusan Masalah yang ketiga terjawab dan untuk hipotesis penelitian diterima bahwa terdapat perbedaan untuk Belanja Tidak Terduga sebelum dan saat Pandemi *Covid 19*.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Perbandingan Belanja Pegawai, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah dilakukannya pengujian *Paired Sample t-Test*, terdapat perbedaan untuk Variabel Belanja Pegawai sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2018-2021.
2. Setelah dilakukannya pengujian *Paired Sample t-Test*, tidak terdapat perbedaan untuk Variabel Belanja Hibah sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2018-2021.
3. Setelah dilakukannya pengujian *Paired Sample t-Test*, terdapat perbedaan untuk Variabel Belanja Tidak Terduga sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2018-2021.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Erlina, Omar S.R., Rasdianto. (2020). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Jakarta : Salemba Empat.
- Fauzi, Fitriya, Abdul B.D., Diah I.A. (2019). Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Peraturan dan Undang-Undang :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sitem Keuangan menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jurnal :

- Fadhilah Nurain, Kiagus Andi, Yunia Amelia, Fitra Dharma (2023). “Perbandingan

Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.24, No.1.

Lu’lu’ul Jannah, Nisa Nabila (2022). “Analisis Kontribusi dan Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Pulau Jawa)”. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE) Vol.1, No.1.

Fitri Rahmawati, Endang Kiswara (2022). “Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia”.Diponegoro Journal of Accounting, Vol.11, No.2.

Ismiyanti, Evada Dewata, Yevi Dwitayanti (2022). “Respon Pajak Daerah. Impresi Covid 19?”. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan

Azhar Thahir (2022). “Analisis Kinerja Belanja Tidak Terduga (BTT) Dalam Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran

Anjelia Onibala, Tri Oldy Rotinsulu, Ita Pingkan F. Rorong (2021). “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara”. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol.22, No.2.

Yan Megawandi, Mulyaningsih (2021). “Analisis Belanja Pegawai dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019-2020”. Jurnal Studia Administrasi, Vol.3, No.2.

Artikel :

Cnbcindonesia.com (2022). Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia : Omicron Mengancam, Jokowi Minta Warga RI Kembali WFH. (Diakses pada 18 Januari 2022).

<https://www.cnbcindonesia.com/news/202118160759-4-308419/omicron-mengancam-jokowi-minta-warga-ri-kembali-wfh>

p2p.kemkes.go.id (2021). Indra Jaya : Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian Covid 19. (Diakses pada 23 December 2021).

<http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/>

M.mediaindonesia.com (2021). Dwi Apriani, M. Media Indonesia : Realisasi Belanja Daerah Pemda Di Sumsel Masih Rendah. (Diakses pada 24 November 2021).

<https://mediaindonesia.com/nusantara/449239/realisasi-belanja-pemda-di-sumsel-masih-rendah>

Sumsel.inews.id (2021). Berli Zulkanedi: Kemendagri Sorot Anggaran Belanja Pegawai di Sumsel tinggi. (Diakses pada 24 April 2021).

<https://sumsel.inews.id/berita/kemendagri-sorot-anggaran-belanja-pegawai-di-sumsel-tinggi>

Gatra.com (2022). Yoga Aditya, Gatra : Kemendagri Minta Pemda Tambah Belanja Tidak Terduga di APBD 2022. (Diakses pada 02 September 2021).

<https://www.gatra.com/news-521509-ekonomi-kemendagri-minta-pemda-tambah-belanja-tak-terduga-di-apbd-2022.html>

Sumsel.bpk.go.id (2021). Linda, Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan : Sumatera Selatan Terpilih Sebagai Penerima Dana Hibah dari Amerika Serikat. (Diakses 30 September 2021).

<https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/09/Sept-3.-Sumsel-terima-dana-hibah-dari-Amerika-Serikat-1.pdf>

Id.theasianparent.com. Annisa Pertiwi : Inilah Besaran Gaji Dokter Umum dan Insentif yang Diterima Saat Pandemi.

<https://id.theasianparent.com/gaji-dokter-umum>